

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penciptaan Karya

Secara umum, konsep *sex* dan gender memiliki perbedaan yang cukup jelas. Istilah gender awalnya muncul dari kajian sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, hak, perilaku, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh norma sosial, budaya, maupun adat. Sementara itu, *sex* atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat permanen dan universal sebagai ketentuan Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gender bersifat dinamis dan dipengaruhi budaya, sedangkan *sex* tidak dapat diubah karena merupakan kodrat biologis (Kartini & Maulana, 2019).

Kesetaraan gender merupakan situasi di mana perempuan dan laki-laki memperoleh hak, peluang, dan perlakuan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Konsep ini tidak menuntut agar laki-laki dan perempuan menjadi sama persis, melainkan menekankan pada pemberian hak yang sama dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam kegiatan, serta menerima perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Trisnawuti & Widiansyah, 2022).

Berdasarkan data dari *Global Gender Gap Report* (GGGR) yang dirilis melalui *Goodstats*, tingkat rata-rata kesetaraan gender secara global pada tahun 2024 berada di angka 68,5%. Hingga saat ini, belum ada satu negara pun yang berhasil mencapai kesetaraan penuh dengan skor 100%. Di Indonesia, skor kesetaraan gender pada tahun yang sama tercatat sebesar 68,6%, atau hanya 0,01% lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Selama 19 tahun dan 16 kali penerbitan laporan GGGR oleh *World Economic Forum*, nilai kesetaraan gender Indonesia konsisten berada dalam rentang 64% hingga 70%. Skor terendah terjadi pada tahun 2008 dengan angka 64,73%, sedangkan pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan skor 70%.

Isu kesetaraan dan keadilan gender merupakan persoalan global yang krusial serta telah menjadi komitmen bersama bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak (Nethan et al., 2022). Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dilakukan melalui beragam kebijakan nasional, yang tercermin dalam GBHN 1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROOPENAS) 2000–2004, serta diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional sebagai strategi utama untuk menciptakan keadilan gender.

Diskriminasi gender merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak lama dan masih banyak ditemui dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, isu ini tetap menjadi permasalahan yang serius. Ketidaksetaraan gender dapat dijumpai di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, dunia kerja, hingga ranah pemerintahan. Ironisnya, ketidaksetaraan tersebut kerap dianggap wajar karena sudah mengakar dalam kebiasaan masyarakat. Padahal, diskriminasi gender membawa dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap kemajuan masyarakat secara keseluruhan (Tedjo et al., 2021)

Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur sosial yang berdampak pada laki-laki maupun perempuan sebagai korbananya. Bentuk ketidakadilan ini paling sering dirasakan oleh perempuan, yang muncul dalam wujud marginalisasi, subordinasi, pelabelan stereotipe, hingga perlakuan diskriminatif. Ketimpangan ini berakar dari budaya patriarki yang sudah mengakar kuat dan membentuk stereotipe di masyarakat. Hal ini terjadi karena konsep kesetaraan kerap disalahartikan sebagai keadilan, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Ketidakadilan gender ini memperkuat posisi perempuan sebagai bawahan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menghambat upaya untuk mencapai kesetaraan yang sejati (Ali, 2023)

Di sisi lain, ada kelompok yang menyoroti masalah yang dihadapi laki-laki, seperti *toxic masculinity*, persoalan hak asuh anak, hingga tingginya angka bunuh diri pada pria. Namun feminis sering kali menekankan bahwa ketimpangan yang ada lebih banyak merugikan perempuan, dan bahwa banyak persoalan yang dialami laki-laki juga berakar dari sistem patriarki. Dalam sistem ini, laki-laki turut menjadi korban ekspektasi sosial yang menekan, sementara perempuan sering kali direndahkan dan dibatasi ruang geraknya. Tokoh feminis liberal seperti Christina Hoff Sommers mengkritik feminisme gelombang ketiga yang menurutnya terlalu radikal dan malah memicu konflik gender yang tidak perlu. Dalam karya-karyanya seperti *Who Stole Feminism?* (1994) dan *The War Against Boys* (2000), ia menyoroti sisi negatif dari feminisme modern yang menurutnya dapat merugikan laki-laki dan memperbesar jurang ketegangan antar gender (Pertiwi, 2025). Oleh sebab itu, dalam karya film ini lebih menitikberatkan tentang keadilan gender karena kesetaraan gender fokus pada hasil yang sama dan penghapusan diskriminasi, sementara keadilan gender adalah proses yang lebih luas yang mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan unik setiap gender untuk mencapai kesetaraan tersebut. Keadilan gender memastikan setiap orang diperlakukan secara adil sesuai kebutuhan mereka, bukan hanya diberi perlakuan yang sama persis, karena terkadang perlakuan berbeda diperlukan untuk mencapai hasil yang setara.

Media merupakan alat yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi antara pengirim pesan dan penerima melalui berbagai saluran komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Media massa adalah kumpulan dari berbagai jenis media yang bertindak sebagai perantara dalam menyampaikan informasi kepada publik secara luas. Istilah "massa" merujuk pada kelompok besar, yang menjadi inti dari konsep media massa sebagai sarana penyampaian pesan secara serempak kepada khalayak. Media dikategorikan sebagai media massa bila memenuhi karakteristik tertentu yang memungkinkannya menjangkau audiens luas (Cangara, 2008).

Salah satu bentuk media massa adalah film, yang bersifat audiovisual dan memiliki struktur yang kompleks. Film tidak hanya berfungsi sebagai karya seni dan media informasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan, alat penyebaran ideologi, dan media politik. Selain memberi hiburan dan edukasi, film juga memiliki kekuatan dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya baru. Baik sebagai film fitur maupun karya seni, film merupakan hasil proses kreatif yang melibatkan kebebasan berekspresi, berperan sebagai hiburan populer, serta merupakan bagian dari industri komersial (Cangara, 2008).

Film tergolong sebagai media komunikasi massa elektronik yang memanfaatkan suara dan gambar secara bersamaan untuk menyampaikan pesan. Melalui kombinasi kata, suara, gambar, serta unsur-unsur teknis lainnya, film menjadi media kontemporer yang berkembang pesat secara global. Film telah menjadi sarana penting dalam menyampaikan hiburan seperti cerita, peristiwa, musik, drama, hingga komedi kepada audiens yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam buku McQuail (2003, hlm. 13), dan diperkuat oleh pernyataan Prof. Effendy (2003) yang menyebutkan bahwa sinema merupakan media komunikasi massa yang sangat berpengaruh, bukan hanya dalam aspek hiburan, tetapi juga dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Dalam pembuatan film pendek, peran sutradara sangat vital dalam menentukan bagaimana cerita akan dikomunikasikan kepada publik. Mulai dari tahap pra-produksi hingga pascaproduksi, sutradara memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan mewujudkan visi cerita dalam bentuk visual, hingga tahap distribusi film. Seorang sutradara harus memiliki pandangan artistik yang kuat terhadap karya yang digarapnya. Menurut Suyanto (2020), sutradara mengatur aspek estetika dan dramatik dari sebuah film dan mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam produksi untuk mewujudkan visi tersebut. Gaya penyutradaraan memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan secara efektif. Salah satu pendekatan yang kerap digunakan adalah realisme, yaitu gaya yang menekankan penyajian peristiwa sebagaimana adanya di dunia nyata.

Meskipun objek yang sama bisa disajikan dengan beragam cara, masing-masing cara penyajian akan memilih aspek tertentu dari objek tersebut, memungkinkan penonton mengenalinya di layar (Amanda & Manesah, 2024).

Aliran realisme pertama kali dikembangkan oleh kritikus film asal Prancis, André Bazin, yang percaya bahwa kekuatan utama sinema terletak pada kemampuannya untuk merepresentasikan kenyataan tanpa manipulasi atau dramatisasi berlebihan. Dalam pandangan Bazin, esensi dari film adalah kemampuannya untuk merekam realitas secara utuh, termasuk dimensi moral dan emosional, serta menjaga kontinuitas ruang dan waktu dari kejadian yang direkam (Fay, 2008). Realisme dalam film bertujuan untuk menampilkan dunia nyata melalui elemen visual dan naratif yang sedekat mungkin dengan kenyataan.

Pendekatan realis dapat dipahami sebagai metode naratif yang berusaha menyampaikan realitas sebanyak mungkin melalui representasi visual. Namun, penting dipahami bahwa realitas tidak bisa diukur secara mutlak. Sebuah objek atau peristiwa bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk, dan masing-masing penyajian akan menyaring atau menekankan unsur tertentu dari objek tersebut. Proses representasi ini akan selalu melalui penyederhanaan demi pencapaian nilai estetika tertentu (Hidayat, 1996).

Salah satu contoh penerapan pendekatan realis dapat ditemukan dalam film pendek "Ruang", yang menunjukkan bagaimana teknik penyutradaraan mendukung penguatan pesan sosial. Dalam film tersebut, bukan hanya alur visual yang ditata, tetapi juga kedalaman makna dan nuansa kejujuran dari cerita yang dibangun. Pendekatan realisme dipilih karena mampu menciptakan atmosfer yang otentik dan dekat dengan kehidupan nyata audiens. Dengan gaya ini, pesan sosial yang diangkat menjadi lebih mengena dan mampu membangkitkan empati terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat (fadhlurrahman dkk., 2025).

Oleh sebab itu, penulis memilih teknik penyutradaraan dengan gaya realis didasarkan pada keinginan untuk menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga penonton dapat merasakan pengalaman yang autentik dan emosional. Pendekatan ini menekankan penggunaan elemen nyata seperti aktor non-profesional, lokasi asli, serta dialog yang natural, sehingga membangun kredibilitas cerita dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Dengan kesederhanaan gaya realis, film mampu mengangkat isu-isu sosial secara lebih jujur dan efektif, sekaligus mendorong penonton untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman maupun kondisi sosial di sekitarnya.

1.2 Manfaat Penciptaan Karya

1.2.1 Manfaat Karya Secara Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan dan penelitian di bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait sosialisasi publik melalui media visual dan sinematografi. Selain itu, karya ini diharapkan dapat menambah referensi akademik mengenai isu kesetaraan gender, sekaligus menjadi contoh nyata penggunaan media audio-visual sebagai sarana membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat.

1.2.2 Manfaat Karya Secara Praktis

Penulis berharap karya ini menjadi sarana edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas mengenai keadilan gender. Dengan penyajian pesan yang singkat, menarik, dan bersifat visual, film ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender.